

ABSTRAK

Perubahan status konservasi satwa *Chloropseidae* menjadi dilindungi mewajibkan pendataan kepemilikan satwa *Chloropseidae* oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Pendataan tersebut memberikan insentif berupa izin penangkaran. Tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, menganalisis status hukum satwa *Chloropseidae* sebagai satwa yang dilindungi. *Kedua*, mengetahui pengaturan wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam kaitannya dengan Izin Penangkaran. *Ketiga*, mengetahui praktik pendataan burung yang dilindungi, pemberian rekomendasi penangkaran burung, dan penegakan hukum kepemilikan satwa *Chloropseidae* oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis nondoktrinal dengan metode pendekatan mikro interaksional-simbolik. Penulis menganalisis secara deskriptif analitis dan diambil simpulannya dengan silogisme induksi.

Status konservasi merupakan *moral obligation* yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan khusus pada satwa. Hanya status konservasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengikat satwa *Chloropseidae* secara hukum. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah tidak berwenang menerbitkan izin penangkaran burung pasca berlakunya *Online Single Submission*, namun tetap berwenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung. Wewenang menerbitkan rekomendasi izin penangkaran burung diperoleh secara atributif, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyelenggarakan *Online Single Submission* memperoleh wewenang penerbitan izin penangkaran burung secara delegatif. Insentif izin penangkaran tidak diberikan kepada pendata satwa *Chloropseidae*, melainkan hanya diberikan insentif berupa pengecekan satwa tanpa dipungut biaya. Berubahnya status konservasi satwa *Chloropseidae* tidak mempengaruhi pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap satwa *Chloropseidae*, maka perubahan pengaturan wewenang penerbitan izin penangkaran maupun kewajiban pendataan satwa tidak mempengaruhi kelestarian satwa *Chloropseidae* secara signifikan.

Kata Kunci: Pengaturan wewenang, Izin Penangkaran, satwa *Chloropseidae*.